

Relasi Agama dan Politik di Indonesia

The Relationship between Religion and Politics in Indonesia

Adang Sonjya¹, Budi Rahayu Diningrat²

¹BRIN, Indonesia

Email: adang.sanjaya@brin.go.id

²Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: budird@gmail.com

ABSTRACT

Islamic politics faced challenges in influencing the future of Indonesia during the post-independence era. Modernist Islamic groups struggled to counter the growing influence of the guided democratic authoritarianism regime. As a result, the Islamic political party Masyumi was disbanded, and its leader, Mohammad Natsir, faced derogatory nicknames such as "ringworm cat" from the authorities. The Nahdlatul Ulama (NU), which sought to compromise with power, had a limited role on the national political stage. This study employs a qualitative method with a literature review approach. The findings indicate that the relationship between religion and power varies across different religions in terms of practice and doctrine. Nonetheless, it is evident that religion and state power are deeply interconnected, with "religion becoming the core of power and power becoming the core of religion." It is crucial to examine this perspective within the context of our respective religious communities.

Keyword: politics, religious relations, Indonesia

ABSTRAK

Politik Islam mengalami kemandulannya, setelah gagal di pentas Nasional dalam menentukan Indonesia masa depan pada pasca-kemerdekaan. Saat itu kelompok Islam modernis tidak mampu membendung kecenderungan rezim otoritarianisme demokrasi terpimpin. Bahkan partai politik Islam Masyumi harus bubar sebagai jawaban kekalahan politik itu dan Mohammad Natsir, ujung tombak kekuatan kelompok ini harus rela dijuluki "kucing kurap" oleh penguasa saat itu. Sementara NU yang berusaha melakukan kompromi dengan kekuasaan, pada akhirnya tidak memiliki peran yang signifikan dalam pentas politik Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan agama dan kekuasaan berbeda dari satu agama ke agama yang lain dalam praktik maupun dalam doktrinnya. Namun pengalaman menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan negara sulit dilepaskan. "Agama menjadi inti kekuasaan dan kekuasaan menjadi inti agama". Pandangan ini perlu kita periksa dalam realitas komunitas agama masing-masing.

Kata Kunci: Politik; Relasi Agama; Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara besar. Luas wilayahnya membentang dari Sabang hingga Merauke. Terdiri dari pulau-pulau yang menurut beberapa studi mencapai 3000 pulau besar dan kecil (Ali dan Effendi, 1987). Negeri yang subur makmur, *gemah ripah lohjinawi*, tanah subur yang “dapat membuat tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman”. Dihuni oleh beraneka macam penduduk dengan perbedaan suku, etnis, bahasa, dan golongan. Atas dasar ini tampaknya cukup tepat, bahwa tokoh Nasional dan perintis kemerdekaan memilih semboyan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai simbol persatuan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kenyataannya, bangsa Indonesia memang tidak bisa lepas aneka macam perbedaan tersebut. Berbagai studi menyebutkan adanya perbedaan yang menyolok dalam fenomena masyarakat Indonesia. Bahkan banyak studi menyebutkan setidaknya terdapat tiga strata dalam masyarakat Indonesia, yang diwakili oleh masyarakat Jawa, yaitu *Abagan*, *Priyayi* dan *Santri* (Gertz, dalam Anwar, 1983). Dalam perkembangannya, tiga model struktur masyarakat Jawa itu berkembang. Studi-studi yang lainnya membagi masyarakat Indonesia terdiri dari kelompok *Nasionalis*, *Islam Tradisionalis*, dan *Islam Modernis* (Ali dan Effendi, 1987).

Nasionalis, Islam Modernis, dan Islam Tradisionalis, hingga kini terus mewarnai perkembangan politik Indonesia. Namun, dalam perkembangan politik Indonesia pasca-rezim Orde Baru dan dalam realitas politik paling mutakhir, kelompok masyarakat Indonesia terpecah dalam klasifikasi status sosial-ekonomi, pemikiran politik, dan perbedaan ideologi. Pembagian klasifikasi itu terutama dalam hal kecenderungan dan cara pandang terhadap realitas politik yang berkembang dewasa ini. Perbedaan kecenderungan itu setidaknya ditunjukkan melalui beberapa kelompok (Ali dan Effendi, 1987).

Kelompok pertama adalah kelompok yang semasa Orde Baru memiliki peluang yang besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi, mereka memperoleh privilese-privilese tertentu dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia lewat jalur kekuasaan, kekeluargaan, dan finansial. Dewasa ini, kelompok tersebut terpecah menjadi berbagai komponen. Mereka meleburkan diri dengan berbagai komponen masyarakat. Tokoh yang berperan pada masa itu kini mendirikan berbagai bentuk kelompok dan organisasi-organisasi. Berupa organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, hingga tidak sedikit yang terjun ke partai-partai politik. Banyak di antara mereka yang kembali berperan di birokrasi pemerintahan. Namun secara spesifik dan dalam kehidupan politik mutakhir, keberadaan kelompok masyarakat ini dapat dilihat pada konsituen Partai Golkar. Seperti diketahui, Partai Golkar pada Pemilu 1999 menempati posisi kedua sebagai peraih suara terbanyak setelah Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P). Pada Pemilu legislatif 2004, partai ini semakin menunjukkan kekuatannya dengan menempati urutan pertama.

Tidak bisa dielakan, bahwa konsituen Partai Golkar adalah para simpatisan rezim Orde Baru. Kelompok ini, ditambah dengan masyarakat yang kecewa dengan perjalanan reformasi Indonesia karena dianggap telah membuat kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya menjadi tidak lebih baik, menjadi kekuatan yang tidak boleh dispelekan. Apalagi mereka termasuk para tokoh yang telah matang dalam politik praksis dan birokrasi pemerintahan. Pada saatnya kelompok ini kembali tampil mendominasi percaturan politik Indonesia ketika orang mulai membandingkan situasi sekarang dengan zaman ketika kelompok ini menguasai kebijakan dan keputusan dalam pemerintahan. Saat ini kekuatan mereka telah menyebar dalam berbagai partai politik. Situasi Negara yang semakin terpuruk memancing mereka membuat partai-partai sendiri. Meskipun demikian, kelompok ini terus menjadi bahan kecaman sebagai biang keladi dari semua keterpurukan. Kecaman-kecaman itu datang dari berbagai komponen atau kelompok lain. Tentu mereka adalah yang merasa menjadi korban, atau setidaknya tidak mendapat peluang dalam kehidupan bernegara, pada saat kelompok memegang peran di pucuk kekuasaan.

Kelompok Kedua, pada realitas politik sekarang. Mereka merupakan kelompok yang pernah menjadi “musuh” Orde Baru. Mereka adalah kaum yang disebut sebagai kelompok “ekstrem” yaitu “ekstrem kiri” maupun “ekstrem kanan”. Kelompok yang pertama, pada masa Orde Baru, hampir tidak memiliki peluang dalam bidang sosial, politik, dan kadang-kadang juga ekonomi. Mereka tidak bisa mengembangkan potensinya. Pada aspek-aspek tertentu, langkah mereka mati sama sekali.

Sebagian besar dari kelompok ini adalah para mantan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan keturunannya atau yang memiliki hubungan darah maupun hubungan lingkungan keluarga dengan Partai Komunis Indonesia. Gerak-gerik mereka diawasi secara ketat, data-data mereka terdaftar dalam daftar kependudukan dengan “catatan merah”. Mereka juga disebut “tidak bersih diri” dan atau “tidak bersih lingkungan”.

Ketika Presiden Soeharto jatuh dan rezim Orde Baru tumbang pada pertengahan 1998, kelompok simpatisan dan bekas anggota partai ini melihat angin segar berhembus ke arah mereka. Tumbuhnya semangat demokratisasi juga sangat bermanfaat bagi mereka untuk kembali menggalang kekuatan. Banyak tokoh-tokoh kelompok ini yang dibebaskan dari tahanan politik maupun narapidana politik. Hak-hak sebagai warga Negara untuk berserikat dan berkumpul, serta menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan juga menjadi dasar bagi mereka untuk kembali tumbuh dan berkembang. Langkah-langkah penggalangan itu diawali dengan pengembangan opini publik. Muncullah opini, kenyataan bahwa PKI sebagai dalang di belakang peristiwa 30 September itu patut dipertanyakan. Teori-teori juga mulai bermunculan sekitar siapa dan apa di balik peristiwa itu. Di antaranya, *pertama*, bahwa peristiwa itu adalah persoalan intern Angkatan Darat. *Kedua*, peristiwa itu merupakan hasil konspirasi Bung Karno dalam upayanya melegitimasi kekuasaannya. Dan *ketiga*, di belakang peristiwa itu bukan PKI, juga bukan merupakan intern Angkatan Darat, tetapi merupakan rekayasa pihak asing untuk menghancurkan komunis di Indonesia¹.

Secara keseluruhan, kelompok yang pernah menjadi warga “anak tiri” ini ingin kembali diakui seluruh hak-haknya sebagai warga Negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Mereka mendambakan suasana politik yang dapat memberi kesempatan bagi mereka untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan politik di Indonesia, paling tidak sebagai masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara yang lain.

Persoalan semacam itu terlihat ketika Mahkamah Konstitusi dengan “beraninya” membuka kesempatan kepada para eks anggota PKI dan mereka yang tidak bersih diri dan bersih lingkungan untuk dipilih menjadi anggota legislatif. Sebagian kalangan rakyat menerima, sebagian yang lain bersikeras tidak bisa menerima. Di sini diperlukan jalan tengah yang dapat mengakomodasikan kecenderungan kedua kelompok tersebut.

Kelompok kedua, yang dikenal dengan sebutan “ekstrem kanan”. Ekstrem kanan merupakan sebutan terhadap mereka yang gemar berbicara tentang politik Islam dan memiliki gagasan-gagasan sekitar Negara Islam. Pada masa Orde Baru, kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang bakal membahayakan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, terhadap mereka, rezim Orde Baru melakukan pemasangan secara politik. Dalam kehidupan politik dan pemerintahan kelompok ini disisihkan dan dimarjinalkan.

Salah satu bentuk pamarjinalan itu adalah diberlakukannya “Asas Tunggal Pancasila” yang dimasukkan dalam Undang-Undang Politik tahun 1985. Asas, bagi Pemerintahan Orde Baru, merupakan faktor utama bagi terbangunnya format politik yang ideal. Konflik-konflik antar-parpol, yang relatif intens yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Soekarno dipandang sebagai konsekuensi dari beragamnya asas.

Akan tetapi, bagi umat Islam, pemberlakuan Undang-Undang tersebut telah mengesampingkan asas dan Ideologi Islam dan karena itu, sama artinya dengan melarang ideologi atau Partai Politik Islam. Semua ormas dan parpol diwajibkan mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian perlakuan terhadap Islam secara ideologi dan politik tidaklah berbeda dengan perlakuan terhadap ideologi Komunis.

Hal ini tentu saja tidak bisa diterima, mengingat dalam sejarah Republik Indonesia. Sejak masa kolonial, Islam di Indonesia telah tampil secara politik dengan menggalang persatuan rakyat mengusir penjajah. Bahkan dapat dikatakan, tanpa Islam dan peran umat Islam, kemerdekaan Indonesia masih dipertanyakan.

¹ Selain hal-hal tersebut di atas, masih banyak argument-argumen yang mencoba mengubah persepsi sejarah PKI di Indonesia, terutama sejarah di balik peristiwa Gerakan 30 September. Hal itu bisa ditelusuri lewat buku-buku yang ditulis para mantan anggota PKI dan simpatisannya. Di antaranya yang cukup populer adalah buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, yang ditulis oleh Ribka Ciptaning.

Aksi-aksi penolakan terhadap asas tunggal-pun bermunculan dengan berbagai bentuk. Aksi paling keras disuarakan oleh ormas-ormas Islam. Puncak dari aksi masyarakat itu muncul dalam peristiwa Tanjung Priok, September 1984, tetapi ratusan umat Islam justru menjadi korban keganasan aparat (Harian Rakyat Merdeka, 2002). Serentetan peristiwa juga terjadi, seperti peledakan gedung BCA, Candi Borobudur, pembajakan Pesawat Woyla lalu kasus Lampung. Namun oleh Pemerintah Orde Baru, berbagai kasus itu dianggap sebagai bentuk ancaman dari “ekstrem kanan” yang bertujuan mengganti dasar Negara dengan Agama.

Sejak itu, gerak-gerik tokoh-tokoh Islam terus diwaspadai. Dalam kehidupan sosial-politik, mereka dibatasi ruang geraknya, banyak di antaranya yang terkena cekal dan beberapa yang lain sempat ditahan. Lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga swasta tertentu cenderung menolak mereka bergabung dan bekerja sama. Sejak saat itu mulai populer istilah Islam “garis keras”, kelompok fundamentalis, bahaya “ekstrem kanan”.

Sejatinnya, kelompok kedua ini tidak ada dalam kehidupan politik Indonesia manakala gagasan-gagasan mereka dibiarkan berkembang secara wajar. Oleh karena itu, kekhawatiran terhadap perkembangan Islam dengan mengerdilkan “politik Islam” merupakan langkah yang keliru. Sebab jika Islam dibebaskan berkembang, termasuk secara politik, maka yang akan tampil adalah tokoh Islam dari kalangan Intelektual dan Cendekiawan yang berpikiran moderat. Namun jika Islam terus ditekan, maka reaksi akan bermunculan dan itu akan datang dari kelompok yang sering dikatakan berhaluan “keras”. Oleh karena itu, era reformasi menjadi arena baru bagi sebagian besar umat Islam, terutama kelompok-kelompok yang mengalami penekanan-penekanan ideologi dan politik masa Orde Baru. Mereka bangkit dengan berbagai peran, dari mulai kebebasan menyampaikan pesan-pesan politik Islam, menawarkan kembali gagasan-gagasan sekitar peran Islam dalam kehidupan bernegara sampai dengan usaha melaksanakan Syari’at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paling menonjol adalah berdirinya parati-partai Islam atau partai-partai berbasis umat Islam. Lahirnya partai-partai Islam ini kemudian membawa persoalan baru bagi umat Islam, yaitu menimbulkan kerawanan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Hal ini dipandang kurang menguntungkan bagi tujuan perjuangan Islam menuju persatuan umat dan persatuan Nasional. Mengingat dalam kondisi apa pun peran umat Islam sebagai jumlah mayoritas sangat menentukan bagi bangsa Indonesia menuju Negara modern yang demokratis. Saat ini, Indonesia masih merupakan negeri Islam terbesar di dunia, karena umat Islam di Indonesia memiliki jumlah terbesar dari seluruh komunitas Islam di seluruh dunia. Sebagai mayoritas, Islam Indonesia memiliki kekuatan yang dahsyat. Islam merupakan aset yang tidak mungkin bisa disepelekan oleh rezim manapun. Pembangunan bangsa ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi umat Islam. Mengganggu, mencurigai, dan menempatkan mereka pada posisi warga “kelas kambing” berarti mengkhianati bangsa sendiri. Bagaimanapun, harus disadari bahwa mengedepankan kepentingan umat Islam dengan tanpa mengesampingkan umat yang lain, menjadi prioritas yang harus dikedepankan. Persoalan bukan selesai dengan memprioritaskan kepentingan mereka. Perlu juga memahami apa yang tengah mereka kehendaki dalam politik mutakhir menghadapi era baru kepemimpinan Nasional. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia menginginkan pemimpin Indonesia adalah sosok yang memiliki tingkat pemahaman keagamaan yang memadai dan komitmen keislaman yang tidak diragukan. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki komitmen keislaman dengan etika perjuangan sesuai dengan konsep-konsep Islam merupakan sosok akan bisa mendapat dukungan dari masyarakat mayoritas tersebut.

Masalahnya, umat Islam Indonesia yang mencapai 80% lebih penduduk Indonesia itu tidak seluruhnya umat Islam yang benar-benar melaksanakan ajaran agamanya. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia tidak seluruhnya memiliki komitmen terhadap perjuangan Islam. Dalam sejarah Islam Indonesia, realitas umat Islam yang demikian itu telah membuka adanya sertifikasi dengan apa yang disebut sebagai “umat Islam Nominal” dan “umat Islam Shalih”. Umat Islam nominal adalah umat Islam yang memeluk Islam tetapi tidak menggunakan Islam sebagai perjuangan dalam masyarakat dan partisipasi kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan umat Islam shalih sebaliknya, mereka tidak saja taat melaksanakan ajaran agamanya, tetapi juga memiliki komitmen untuk memperjuangkan agamanya dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Fenomena sejarah umat Islam tersebut dapat dilihat pada perkembangan politik Indonesia menjelang dan pada saat proses menuju suksesi kepemimpinan Nasional 2004. Lembaga Studi Indonesia (LSI) misalnya, menemukan pemilih Islam Indonesia pada Pemilu 2004 dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah muslim religius, mereka adalah pemilih beragama Islam yang benar-benar melaksanakan ajaran agamanya, jumlah pemilih muslim religius mencapai 49,8% dari seluruh populasi pemilih muslim. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok pemilih muslim tidak religius, yaitu pemilih muslim yang tidak taat beribadah. Kelompok ini memiliki jumlah yang lebih besar dari pemilih muslim religius, mencapai 50,2% dari seluruh populasi pemilih muslim (Lembaga Studi dan Advokasi Kerukunan Umat Beragama/ LSKAU).

Dengan kondisi ini, sulit disangkal bahwa politik Islam, minimal untuk kasus Indonesia, semakin mengalami kemundurannya, setelah gagal di pentas Nasional dalam menentukan Indonesia masa depan pada pasca-kemerdekaan. Saat itu kelompok Islam modernis tidak mampu membendung kecenderungan rezim otoritarianisme Demokrasi Terpimpin. Bahkan partai politik Islam Masyumi harus bubar sebagai jawaban kekalahan politik itu dan Mohammad Natsir, ujung tombak kekuatan kelompok ini harus rela dijuluki “kucing kurap” oleh penguasa saat itu. Sementara NU yang berusaha melakukan kompromi dengan kekuasaan, pada akhirnya tidak memiliki peran yang signifikan dalam pentas politik Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan yang berkaitan dengan relasi agama, politik, dan demokrasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal dan literatur kepustakaan yang mendukung tema dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Agama dan Politik

Politik dan agama memiliki dasar sejarah yang panjang terjadi sejak abad-abad sebelumnya. Sebuah teori mengatakan bahwa agama adalah dasar politik. Dengan agama yang dibawanya, misi Rasul yang membawa ajaran Tuhan membentuk jejaring kekuatan untuk menyebarkan dan mewujudkan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa agama harus memiliki otoritas politik.

Ketika gerakan keagamaan menghadapi musuh yang merasa terancam oleh gerakan kenabian, kekuasaan politik yang berasal dari agama ini semakin penting. Karena itu, pemerintahan yang berkuasa selalu menghadang dan mengancam para Rasul Tuhan. Karena itu, tidak mengherankan bahwa kisah Ibrahim, Musa, Yesus, dan Muhammad berhadapan secara langsung dengan pemerintahan kejam yang menahan warganya. Kekuatan politik harus dilawan dengan kekuatan politik. Oleh karena itu, ada alasan logis-historis untuk menyatakan bahwa politik dan agama tidak dapat dipisahkan.

Dalam sejarah Islam, setelah pindah ke Madinah, Nabi Muhammad membuat perjanjian sosial dan politik yang disebut Piagam Madinah. Komunitas politik-religius yang berpusat di Madinah, yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan berbagai inovasi dan deviasi, adalah salah satu warisan budaya yang sangat fenomenal yang diwariskan oleh Nabi Muhammad.

Ini juga berlaku di Barat. Meskipun Vatikan adalah lembaga keagamaan yang berprinsip moral, Vatikan selalu memberikan pesan moral dalam politik saat politik dianggap merendahkan martabat manusia dan menyebabkan perang. Oleh karena itu, agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Bisku Buddha Thailand juga kadang-kadang terlibat dalam politik dengan menyampaikan pesan moral keagamaan. Tidak mungkin politik tanpa agama. Hubungannya saja yang berubah dan berubah dari zaman ke zaman. Politik maupun agama pada awalnya suci dan mulia, dan tujuannya adalah untuk mengangkat martabat manusia berdasarkan pesan Ilahi. Namun, dengan mengkhianati pesan mulia tersebut, panggung politik berubah menjadi arena perebutan kekuasaan.

Kemudian politik dan agama berbeda. Politik dan agama berada di wilayah negara dengan pemerintahan. Selain itu, yang paling menyedihkan adalah ketika ajaran agama diubah dan digunakan sebagai alat untuk melawan kekuatan politik, bukannya sebagai referensi etika berpolitik. Agama tidak mengajarkan cara berpolitik yang anggun dan terhormat; sebaliknya,

agama digunakan untuk memanipulasi politik. Meskipun agama menegaskan bahwa seseorang harus menjalani kehidupan yang tidak korup, banyak orang yang selalu menggunakan simbol dan identitas agama telah melakukan korupsi. Pada titik ini, agama tidak lagi memiliki nilai-nilai dan kekuatan yang diperlukan untuk menghentikan korupsi; sebaliknya, ajarannya dibangun sedemikian rupa sehingga orang dapat memahami dan menerapkannya sebagai cara untuk menyucikan diri dari dosa korupsi. Pemahaman yang jelas tidak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama. Zikir-zikir dan ritual keagamaan, paham dan praktik keagamaan yang justru merusak martabat agama, dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai tindakan pidana.

Lembaga politik maupun agama menciptakan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai agama yang diyakini berasal dari Yang Kudus digunakan sebagai dasar untuk seluruh realitas, di dunia maupun akhirat. Di sisi lain, nilai-nilai politik digunakan sebagai dasar untuk menjalankan struktur masyarakat. Menurut KH Sahal, politik adalah fakta historis dan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Dia percaya bahwa watak politik memengaruhi manusia sepanjang hidup mereka. Dalam setiap kelompok, mungkin ada yang menguasai dan memerintah, ada yang memerintah, dan ada yang dipengaruhi; itulah konteks politik. Politik adalah kebutuhan dasar manusia. Ini menunjukkan bahwa negara, politik, dan agama tidak dapat dipisahkan. K.H Sahal menggambarkan hubungan agama sebagai simbiosis mutualisme di mana kedua pihak saling memengaruhi dan membutuhkan satu sama lain untuk kebaikan umat.

Agama didefinisikan sebagai sistem atau sebuah kepercayaan terhadap Tuhan, atau juga di antaranya ada yang menyebutnya dengan sebutan Dewa atau nama lainnya yang berhubungan dengan kepercayaan kepercayaan tersebut. Sedangkan menurut Emile Durkheim (1915) yang menyebutkan bahwa agama merupakan suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang bersifat sakral dan suci. Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, *āgama* yang berarti "tradisi"². Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan ber-religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Orang-orang tahu bahwa mereka hanya memiliki kemampuan terbatas. Mengetahui bahwa mereka memiliki keterbatasan ini mendorong mereka untuk percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar diri mereka. Selain itu, hal yang luar biasa itu pasti berasal dari sumber yang luar biasa. Selain itu, sumber-sumber yang luar biasa itu bervariasi sesuai dengan bahasa manusia. Misalnya, dia bisa disebut sebagai Tuhan, Dewa, God, Syang-ti, atau Kami-Sama, atau dia bisa disebut dengan hanya sifat-Nya, seperti Yang Maha Kuasa, Ingkang Murbeng Dumadi, atau De Weldadige.

Keyakinan ini mendorong orang untuk mendekati diri kepada Tuhan dengan menghambakan diri, pertama-tama menerima kepastian yang diyakini berasal dari Tuhan yang mereka anggap berasal dari Tuhan, dan kedua, mematuhi setiap aturan, peraturan, hukum, dll. yang mereka anggap berasal dari Tuhan. Jadi agama adalah pengabdian manusia kepada Tuhan. Ada tiga komponen dalam pengertian agama: manusia, penghambaan, dan Tuhan. Agama adalah ajaran atau paham yang menggabungkan ketiga komponen utama pengertian tersebut. Dalam arti yang lebih luas, agama juga dapat diartikan sebagai cara hidup. Dengan kata lain, agama yang dianutnya mengatur semua aktivitas lahir dan batin pemeluknya. Aturan agama memengaruhi cara kita makan, bergaul, beribadah, dan lainnya.

Politik, berasal dari bahasa Yunani; *politikos*, yang berarti; dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, politik merupakan adalah proses pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang mencakup proses pengambilan keputusan, terutama di negara. Ini adalah penjelasan yang menggabungkan berbagai definisi ilmu politik tentang hakikat politik. Proses memperoleh kekuasaan, secara konstitusional maupun nonkonstitusional, dikenal sebagai politik. Selain itu, ada banyak perspektif yang dapat digunakan untuk melihat politik, seperti: (1) Usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama disebut politik (Aristoteles klasik); (2) Istilah politik mengacu pada bagaimana negara dan pemerintah beroperasi; (3) Mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat adalah tujuan dari politik; (4) Politik mencakup

² Menurut kamus Sanskerta-Inggris Monier-Williams (cetakan pertama tahun 1899) pada entri *āgama*: ...a traditional doctrine or precept, collection of such doctrines, sacred work [...]; anything handed down and fixed by tradition (as the reading of a text or a record, title deed, &c.)

proses perumusan dan kebijakan. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa politik menyangkut konsep-konsep pokok, yaitu; (1) Negara, (2) Kekuasaan (3) Pengambilan keputusan, (4) Kebijaksanaan (5) Pembagian atau alokasi.

Singkatnya, dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, hubungan antara agama dan politik terkait, meskipun keduanya harus dipisahkan. Satu pihak, masyarakat agama sangat menginginkan agar agama tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Ini karena, ketika agama menguasai politik, kita dapat memprediksi bahwa akan terjadi kekacauan. Agama, yang pada awalnya dimaksudkan untuk menghilangkan penindasan dan ketidakadilan, pada akhirnya akan menjadi alat pemerintah yang menindas dan mengeksploitasi rakyatnya dan menyebabkan kesengsaraan. Politik tidak lagi bergantung pada agama; sebaliknya, kekuatan politik telah membuat agama tidak berdaya.

Namun demikian, agama memiliki tanggung jawab moral untuk mengontrol politik agar tidak berkembang dengan cara yang merusak. Agama tidak terlibat langsung dalam politik praktis di sini. Karena agama menjadi bagian dari politik, kekuatan moralnya akan hilang dan tidak dapat lagi mengatur politik. Akibatnya, agama dan politik harus diperhatikan sehingga keduanya tidak terjebak dalam posisi yang tidak sesuai. Agama hanya berlaku dalam hubungan antara manusia dan tuhan secara pribadi atau sangat terbatas dalam hubungan sosial sesama manusia. Konstitusi negara tidak mengandung agama sebagai undang-undang, tetapi agama hanya ada dalam etika dan moral para politisi. Montgomery Watt, pendukung *sociology of knowledge* berpendapat bahwa semua idea-idea teologis dan filsafat mempunyai hubungan dengan masalah politik dan sosial. Khususnya hubungan teologi dan politik. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Daniel Dhakidae (2003) dalam bukunya *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* melakukan analisis yang tajam tentang hubungan “agama dan negara”.

Relasi Agama dan Negara

Dalam pandangan Islam, hubungan agama-negara adalah hubungan yang positif, dalam arti bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan sepenuhnya, dan bahwa agama tanpa negara adalah cacat, yang akan menyebabkan pengurangan dan distorsi yang parah. *Religion* tidak dapat terpisah dari negara. Konstitusi dan setiap undang-undang yang mengatur negara dan masyarakatnya mengatur semua aspek kehidupan. Maka dari itu, tidak heran banyak pendapat para ulama dan cendekiawan Islam yang menegaskan bahwa agama-negara adalah sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya ibarat dua keping mata uang, atau bagaikan dua saudara kembar (*tau`amaani*). Jika dipisah, hancurlah perikehidupan manusia. Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa juz 28 halaman 394 telah menyatakan “Jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak.”

Secara teoritis relasi antara agama dan Negara dapat di klasifikasikan ke dalam 3 hal:

Paradigma Integralistik

Pandangan Negara theokrasi dan paradigma integralistik sangat mirip. Paradigma ini menganut gagasan bahwa agama dan negara adalah satu dan sama. Keduanya bergabung. Selain itu, konsep ini menegaskan bahwa negara adalah lembaga agama dan politik. Konsep ini menegaskan lagi bahwa agama tidak membedakan antara agama dengan negara atau politik. Pola hubungan integratif ini menghasilkan gagasan tentang agama-negara, yang berarti bahwa hukum dan prinsip agama mengatur kehidupan negara. Oleh karena itu, paradigma integralistik selaras dengan gagasan bahwa Islam adalah agama dan bahwa negara memiliki hukum positif yang berasal dari hukum Islam.

Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara saling membutuhkan dan timbal-balik. Menurut perspektif ini, agama harus digunakan sebagai alat untuk melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga membutuhkan agama untuk memberikan moralitas, etika, dan keyakinan kepada warganya.

Paradigma Sekularistik

Menurut paradigma sekularistik, ada perbedaan yang jelas antara agama dan negara. Negara dan agama adalah entitas yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda, jadi mereka harus terpisah satu sama lain dan tidak boleh mengganggu satu sama lain. Sementara negara adalah masalah publik, agama adalah masalah pribadi setiap warga negara. Berdasarkan pemahaman ini, hukum positif yang berlaku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui kontrak sosial dan tidak terkait sama sekali dengan hukum agama.

Dalam setiap pertarungan pasti ada korban. Apapun bentuk pengorbanan itu: harta dan benda, tenaga dan pikiran, hati dan perasaan. Mengorbankan apa yang dimiliki dan menjadi korban dari kekalahan yang ia terima. Ia tidak hanya mengorbankan harta benda, tenaga dan pikiran, hati dan perasaan, tetapi juga harga diri, martabat dan kehormatan. “Menang jadi arang kalah jadi Abu”. Yang kalah dan yang menang sama-sama merugi. Pengorbanan juga menimpa mereka yang tidak ikut bertarung. Bagai pelanduk yang mati terinjak-injak di tengah-tengah pertarungan gajah dengan banteng. Pertarungan memperebutkan kepemimpinan Indonesia adalah menyangkut kepentingan bangsa dan Negara. Karena itu harus menghindari langkah-langkah yang tidak terpuji, menata strategi politik dengan anggun dan cantik. Menghindari konspirasi, saling menjegal dan menghilangkan selecil mungkin cara-cara licik. Pertarungan menuju kepemimpinan nasional juga dalam rangka menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis. Karena itu menyerahkan seluruh prosesnya kepada rakyat adalah bentuk pertumbuhan demokrasi yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Bangunan demokrasi yang baik adalah dimulai dari bawah, tidak ada intimidasi dan tekanan. Lebih dari itu, pertarungan memperebutkan kepemimpinan nasional adalah pertarungan mewujudkan cita-cita, keinginan, dan harapan. Cita-cita untuk menjadi bangsa yang maju dan besar, keinginan akan terjadinya perubahan dan harapan menuju keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dari dan untuk segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Pertarungan itu berarti perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan merupakan bagian dari cinta dan pengabdian. Setiap pertarungan pasti menghasilkan kemenangan dan kekalahan. Akan tetapi, dalam bingkai perjuangan, kemenangan akan menjadi milik bersama. Karena itu, kekalahan menjadi tidak ada. Walaupun hubungan agama dan kekuasaan berbeda dari satu agama ke agama yang lain dalam praktik maupun dalam doktrinnya, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan negara sulit dilepaskan. “Agama menjadi inti kekuasaan dan kekuasaan menjadi inti agama”. Pandangan ini perlu kita periksa dalam realitas komunitas agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi. (1987). *Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Anwar, Dewi Fortuna. (1983). “Pertarungan Ka’bah dan Garuda”, *Prisma*.
- Dhakidae, Daniel. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*.
- Durkheim, Émile. (1915). *The Elementary Forms of the Religious Life*. London: George Allen & Unwin.
- Harian Rakyat Merdeka, 28 September 2002
- Kholid O. Santosa. (2009). *Praktek Demokrasi Langsung di Indonesia*, Bandung: Segi Arsy.
- Lembaga Studi dan Advokasi Kerukunan Umat Beragama (LSKAU)
- Monier-Williams. (1899). pada entri *āgama*: ...a traditional doctrine or precept, collection of such doctrines, sacred work [...]; anything handed down and fixed by tradition (as the reading of a text or a record, title deed, &c.)
- Sumantho Al-Qurthubi. (2002). *Era Baru fiqh Indonesia*. Penerbit Cermin.
- Wiliam Budiarto. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.